



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2019 – 2023**



**“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Desember 2016. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ini mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2023 ke depan. Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, rewiu renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumsel periode 2018-2023 ini didasari dan tetap mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2019-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2018–2023 Provinsi Sumatera Selatan adalah arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018–2023 antara lain :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2019-2023 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

2. Merumuskan program prioritas pembangunan sesuai tahun 2018-2023 RPJMD tahun 2019-2023 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Selatan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
  - 1.3.1. Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

### **Bab II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
  - 2.2.1. Susunan kepegawaian
  - 2.2.2. Aset yang dikelola
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

- 2.3.1. Pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan  
berdasarkan Renstra 2013-2018
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  
Provinsi Sumatera Selatan
  - 2.4.1. Analisis Renstra K/L
  - 2.4.2. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  
(RTRW)
  - 2.4.3. Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
(KLHS)

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  
Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra  
Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

### **Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan**

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

### **Bab VII Penutup**

### **Lampiran-Lampiran**



## **Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah, sedangkan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan



- perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
  - m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
  - p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
  - q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
  - r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
  - s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
  - t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
  - u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  - v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
  - x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
  - y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  - z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
  - aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
  - bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;

- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.
- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan

Kapasitas:

1. Seksi Tata Lingkungan
  2. Seksi Pengkajian Lingkungan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
  2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
  3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
  3. Seksi Perubahan Iklim.
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
  2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
  3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan
1. Seksi Pengadaan Tanah.
  2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
  3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup
1. Seksi Tata Usaha.
  2. Seksi Teknis.
  3. Seksi Mutu.
- Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Pada awal Tahun 2022 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 67 (enam puluh tujuh). Dibawah ini adalah gambaran PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal, diklat dan lain-lain pada tahun 2022.

- a. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2022

Tabel 2.1 PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2022

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	I.c	1	
2.	II.a	-	
	II.b	-	
	II.c	-	
	II.d	1	
3.	III.a	4	
	III.b	3	
	III.c	16	
	III.d	22	
4.	IV.a	12	
	IV.b	6	
	IV.c	1	
	IV.d	1	
	IV.e	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	

- b. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pendidikan Formal dan Kepangkatan

Tabel 2.2 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan 2022

NO	JENIS PENDIDIKAN	GOLONGAN													JUMLAH	
		I	II				III				IV					
		c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		e
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
2.	SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
3.	SMA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
4.	D.III	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	<b>6</b>
5.	D.IV	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
6.	S.1	-	-	-	-	-	1	-	11	15	2	-	1	-	-	<b>30</b>
7.	S.2	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	5	-	1	-	<b>27</b>
8.	S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

- c. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

Tabel 2.3 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	ADUM	20	
	ADUMLA		
	PIM IV		
2.	SPAMA	9	
	PIM III		
3.	SPAMEN	3	
	PIM II		
4.	PIM I	-	
	SPATI		
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	

- d. Data Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 4 berikut ini

Tabel 2.4 Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	19	
2.	Eselon III	7	
3.	Eselon II	1	
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	

e. Data Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5 Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan  
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pengendalian Dampak Lingkungan	8	
2.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	
3.	Pemetaan	1	
4.	Arsiparis	-	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

f. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi  
Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan.

Tabel 2.6 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi  
Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Kursus Teknis  
Lingkungan

No.	Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	AMDAL A	28	
2.	AMDAL B	9	
3.	AMDAL C	16	
4.	Pengawas Lingkungan	6	
5.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	
6.	PPNS Lingkungan	2	
7.	PPNS Perda	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>66</b>	

### **2.2.2 Aset yang dikelola**

Aset yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu gedung kantor yang terdiri dari 3 lantai sebagai berikut:

- Lantai pertama : Ruangan Laboratorium Lingkungan, dan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- Lantai kedua : Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris Dinas, Bidang Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, dan Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- Lantai tiga : Bidang Pertanahan, Ruang Sholat, Ruang Jabatan Fungsional, Ruang Dharma Wanita, Ruang Rapat Adipura, Aula Kalpataru dan Ruang Sekretariat Komisi AMDAL.

Untuk Kendaraan terdiri dari Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit bersumber dana APBD, 1 (satu) unit bersumber dana UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan 3 (tiga) unit bersumber dari hibah Kementerian Lingkungan Hidup RI. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 (sebelas) unit yang bersumber dana APBD. Sedangkan Alat-alat kantor adalah komputer, laptop, kursi meja dan meja kerja dengan kondisi baik dan sebagian rusak ringan tersebar di Sekretariat, bidang-bidang dan di Laboratorium.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel terdapat barang inventaris pinjam pakai dari Setda Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (unit) kendaraan roda 2 (dua).

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat aset tanah dengan keterangan sebagai berikut:

#### **A. Letak dan Lokasi**

Tanah terletak disisi jalan Aerobik, yang merupakan daerah bebas banjir. Didaerah ini telah tersedia fasilitas listrik, air dan telepon



yang telah tersambung pada lokasi. Lalu lintas utama di daerah ini terdapat di jalan POM IX atau ± 100 m dari lokasi. Lokasi ini didominasi oleh bangunan kantor dengan ketinggian rata-rata 3 (tiga) lantai.

#### B. Data Tanah

Tanah Perkantoran saat ini beralamat di Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang, dengan luas tanah 2.975 M<sup>2</sup>.

Batas – batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara : Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- Timur : Jalan Aerobik
- Selatan : Dam
- Barat : Lapangan Tembak Sriwijaya

Bentuk tanah persegi panjang, kontur tanah datar dengan ketinggian lebih kurang sama dengan permukaan jalan.

#### C. Bangunan

Bangunan Yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu berupa :

- Bangunan gedung Kantor yang berlokasi di jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang terdiri dari 3 lantai yang luasnya 1.729 M<sup>2</sup>
- Bangunan Rumah untuk Penjaga Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 120 M<sup>2</sup>
- Bangunan garasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memiliki luas 26 M<sup>2</sup>
- Bangunan parkir motor dan mobil yang memiliki luas 15 M<sup>2</sup>
- Bangunan sarana stasiun monitoring kualitas air yang berada di pinggir sungai Musi

Tabel 2.7 Data Inventaris Barang Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Kondisi Aset yang ada (UNIT)				Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jum	
1.	Tanah	1	-	-	1	Persil
2.	Bagunan Gedung	6	-	-	6	Unit
3.	Kend.Roda 4	7	3	-	10	Unit
4.	Kend.Roda 2	11	-	-	11	Unit
5.	Komputer (PC)	4	1	6	11	Unit
6.	Laptop/ Notebook	31	4	2	37	Unit
7.	Meja Kerja	69	-	-	69	Buah
8.	Kursi Kerja	69	-	-	68	Buah

*Keterangan : Pengadaan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan kecuali 3 kendaraan roda 4 bersumber dari dana APBN*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup yang diserahkan/desentralisasi dan yang dilimpahkan/dekonsentrasi kepada provinsi, dengan fungsi utama menyelenggarakan pelayanan terhadap pembinaan umum dan teknis, penyusunan kebijakan dalam hal Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat Perusahaan maupun tingkat masyarakat. Salah satu pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengkajian terhadap Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan, rumah sakit, jembatan, pabrik, perumahan, jalan, terminal, pasar dan bangunan perkantoran, yang dilakukan agar tidak terjadi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga dilakukan layanan jasa analisa laboratorium lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan pertanahan.

### **2.3.1 Pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2019-2023**

Secara umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2019-2023 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan T-C.24 di bawah ini.

TABEL T-C.23.  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				58.99	59.23	67.34	67.35	67.40	66.34	62.04	67.29	67.59	68.53	112.46	104.74	99.93	100.36	101.68
2	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 sektor (Pertanian, Kehutanan & Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah)				2,600,380,141.50	2,730,211,489.37	2,865,701,970.32	4,554,931.00	4,557,072.00	2,532,904,494.61	2,706,851,997.13	2,846,287,166.38	406,075.00	575,200.00	97.41	99.14	99.32	8.92	12.62
3	Jumlah Penurunan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah				160,528.00	189,923.00	208,354.00	82,675.00	83,718.00	250.33	2,804.30	175.58	29.43	9,251.29	0.16	1.48	0.08	0.04	11.05
4	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup				21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	42,000	30,724	21,500	23,000	24,000	200.00	142.90	97.73	102.22	104.35
5	Persentase pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ verifikasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

6	Jumlah peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi				Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Luas lahan yang di bebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum				50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	144,012	155,205	28,239	513	1,270	288.02	310.41	56.48	1.03	2.54
9	Persentase Kasus Pertanahan yang di fasilitasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

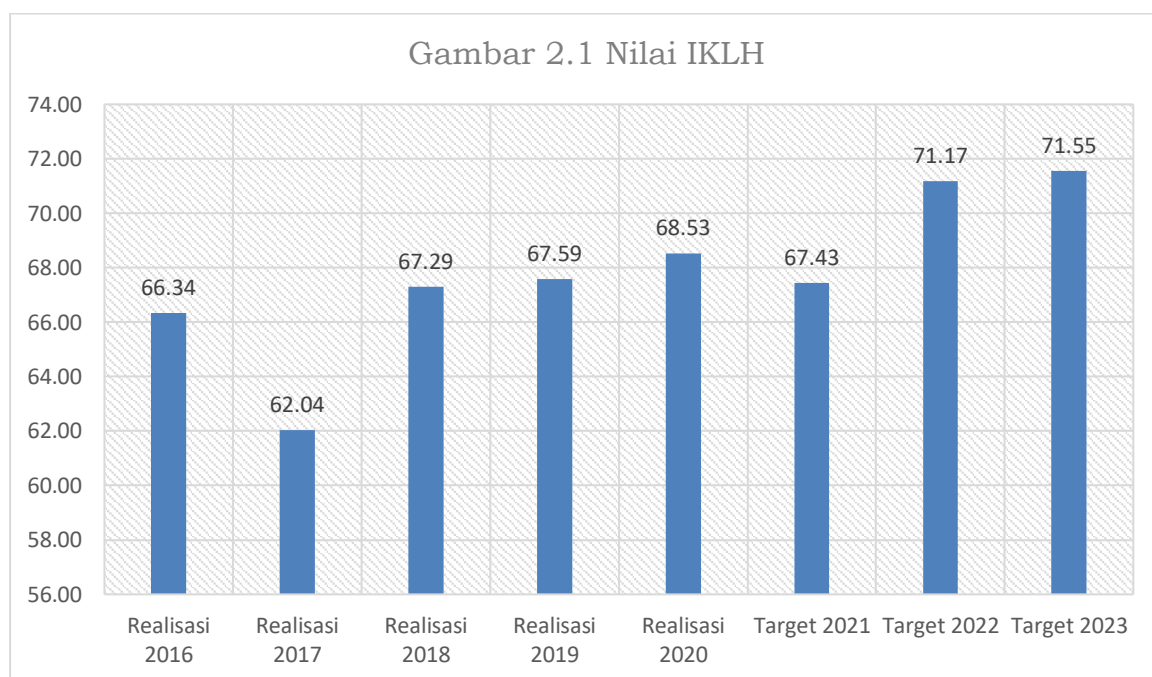
TABEL T-C. 24.  
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	3,853,484,380	193,896,812,528	49,289,071,624	29,329,961,511	29,646,824,607.01	1,817,946,055	141,860,409,322	41,526,229,064	5,587,123,468	6,805,353,403.70	47.18	73.16	84.25	19.05	22.95	-32.47	-358.23
Belanja Tidak Langsung	5,157,629,313	4,898,648,000	8,171,778,000	8,526,134,000	9,806,132,000	5,139,130,413	4,850,714,730	7,406,368,544	8,011,305,847	8,036,951,906	99.64	99.02	90.63	93.96	81.96	30.40	13.29
<b>Jumlah</b>	<b>9,011,113,693</b>	<b>198,795,460,528</b>	<b>57,460,849,624</b>	<b>37,856,095,511</b>	<b>39,452,956,607</b>	<b>6,957,076,468</b>	<b>146,711,124,052</b>	<b>48,932,597,608</b>	<b>13,598,429,315</b>	<b>14,842,305,310</b>							

Berdasarkan Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C. 24 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel pada tahun 2016 – 2020 dalam kurun waktu RPJMD 2016–2020 dapat disampaikan analisis sebagai berikut :

### 1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perbandingan nilai IKLH Tahun 2016 s.d. 2020 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2021 dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 seperti dilihat pada grafik berikut :

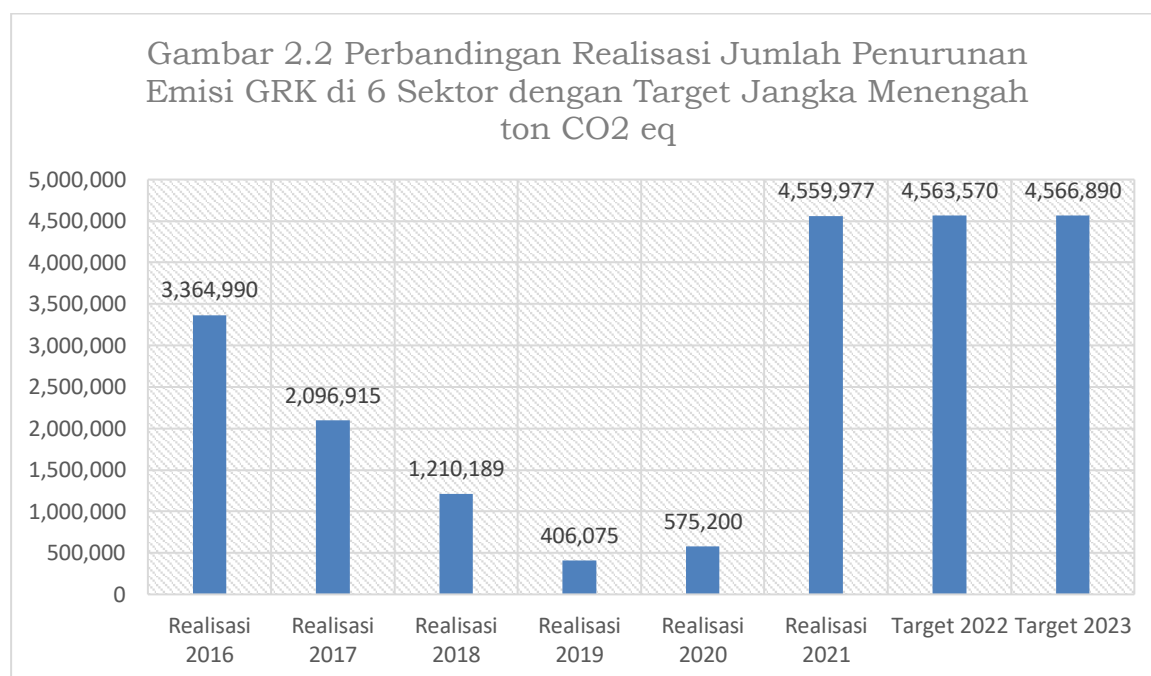


Pada Tahun 2016 sampai pada Tahun 2017 nilai IKLH mengalami fluktuasi penurunan, hal ini disebabkan adanya kebakaran hutan tahun 2017 seluas 9286 Ha dengan jumlah hotspot 1204 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 2016 luas kebakaran hutan hanya 978 Ha dengan jumlah hotspot 973 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 belum tercapai. Untuk selanjutnya Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan dan juga penurunan.



## **Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah)**

Indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di mana pada Tahun 2030 secara Nasional target penurunan emisi GRK sebesar 29% jika dilakukan sendiri (tanpa bantuan), tetapi apabila dengan bantuan pihak lain (bantuan luar negeri) penurunan emisi GRK ditargetkan sebesar 41%. Berikut grafik Perbandingan Realisasi Jumlah Penurunan Emisi GRK di 6 Sektor dengan Target Jangka Menengah ton CO<sub>2</sub> eq :



Target penurunan emisi GRK di Prov. Sumsel dari sektor Pertanian dan peternakan, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri serta Pengelolaan Limbah. Penetapan target penurunan Emisi GRK tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target penurunan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Target Penurunan Emisi Kumulatif

NO	SEKTOR	BASELINE (ton CO2 eq)			JUMLAH AKSI		PERKIRAAN PENURUNAN EMISI KUMULATIF (SD 2030)	
		TAHUNAN (2030)	KUMULATIF	2011-2030	INTI	PENDUKUNG	TON CO2 Eq	PERSEN
1	Perubahan Penggunaan Lahan dan Gambut	19.373.021	368.483.912	2011-2030	5	3	82.594.544	22,51
2	Pertanian-Peternakan	8.666.629	139.517.202	2011-2030	8	6	1.141.449	0,82
3	Limbah	998.591	18.842.960	2010-2030	11	32	1.751.268	9,20
4	Energi-Transportasi	14.664.196	209.246.468	2010-2030	6	9	1.264.441	0,60
	Total (Semua Sektor)	43.702.437	736.090.542		30	50	86.751.702	11,79

Dari sektor yang diperhitungkan dalam kaji Ulang RAD GRK, diperkirakan akan berdampak pada penurunan emisi terhadap *baseline* Provinsi Sumatera Selatan. Bidang Perubahan penggunaan lahan dan gambut berpotensi menurunkan emisi hingga 22,51 % secara kumulatif, sedangkan sektor lain seperti pertanian-peternakan, limbah, dan energi-transportasi adalah 0,82 %, 9,20 %, dan 0,60 %, sehingga secara keseluruhan dibandingkan dengan baseline (total) seluruh aksi mitigasi berpotensi menurunkan emisi sebesar 11,79 %.

Stakeholder yang berperan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) merupakan penanggung jawab kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan di setiap bidang. Beberapa stakeholder kunci yang berperan dalam PEP RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Peran Institusi Terkait PEP RAD-GRK

No	Institusi	Peran
1	Bappeda	berperan sebagai koordinator PEP RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan
2	Dinas Kehutanan	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang kehutanan dan lahan gambut
3	Dinas Pertanian	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pertanian, peternakan dan perkebunan
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang energi
5	Dinas Perhubungan	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang transportasi
6	Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah

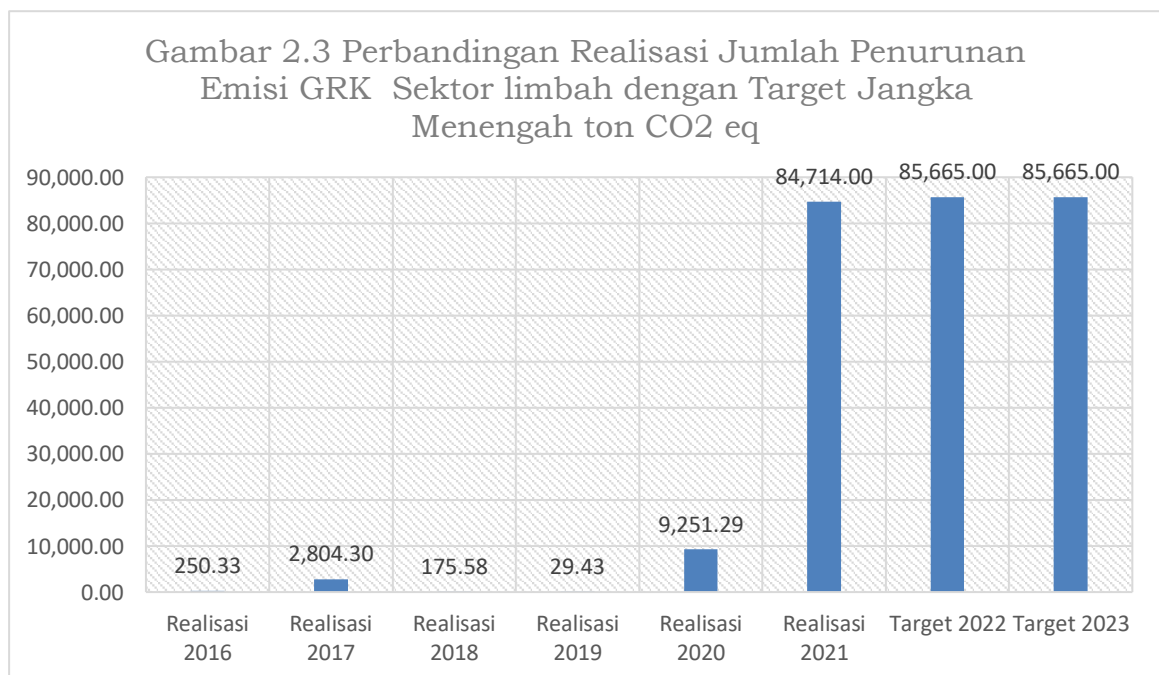
7	Dinas Lingkungan Hidup	berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah
---	------------------------	---

Data-data mitigasi yang dilaksanakan tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi AKSARA melalui situs [pprk.bappenas.go.id/aksara](http://pprk.bappenas.go.id/aksara) oleh koordinator sektor, sehingga didapat penurunan emisi GRK pada masing-masing sektor pada tahun bersangkutan (Kegiatan T-1).

## 2. Jumlah penurunan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Limbah

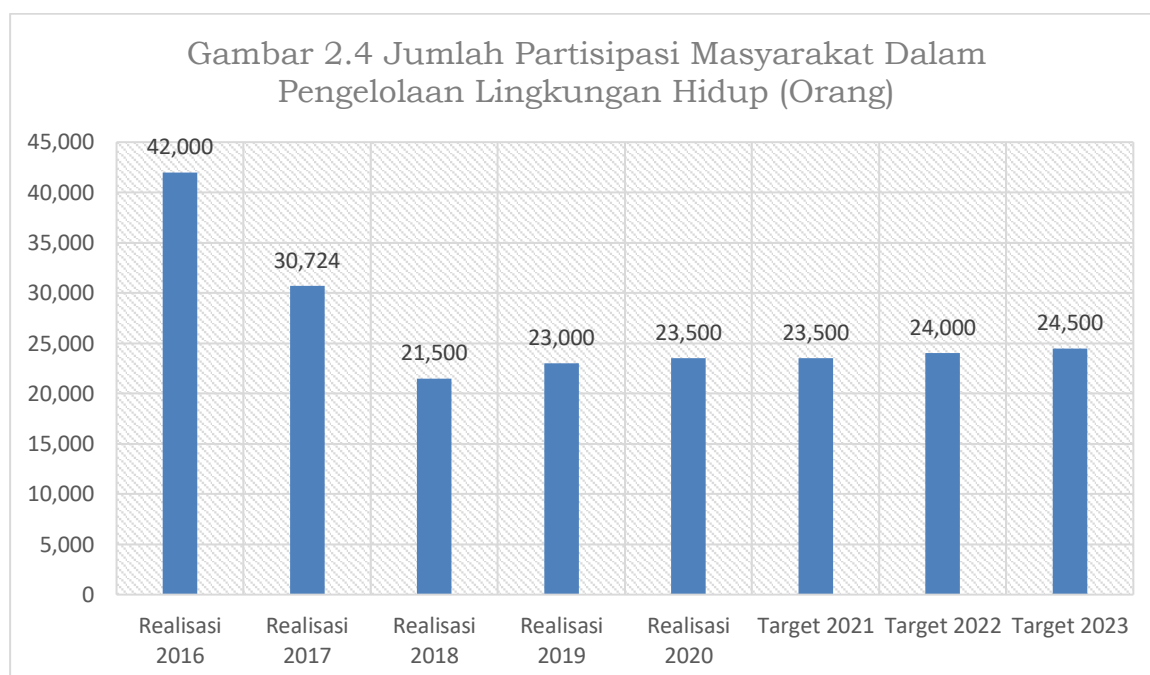
Target penurunan emisi GRK di Prov. Sumsel dari sektor Pengelolaan Limbah didapat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Stakeholder yang berperan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) merupakan penanggung jawab kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan di bidang pengelolaan limbah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov Sumsel dan Dinas PU Perkim Prov Sumsel. Data-data mitigasi yang dilaksanakan tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi AKSARA melalui situs [pprk.bappenas.go.id/aksara](http://pprk.bappenas.go.id/aksara) oleh koordinator sektor, sehingga didapat penurunan emisi GRK pada sektor tersebut pada tahun bersangkutan (Kegiatan T-1), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



### 3. Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Bila dibandingkan pada Tahun 2016 sampai dengan 2020, terjadi peningkatan dan penurunan partisipasi masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan.



Di tahun-tahun mendatang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan berusaha untuk terus meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan bersifat stimulaif yang secara tidak langsung dapat mengubah *mind set* masyarakat terhadap limbah terutama limbah domestik/rumah tangga.

Standar nasional untuk indikator partisipasi masyarakat, aparatur dan stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak ada. Indikator ini merupakan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis 2019-2023.

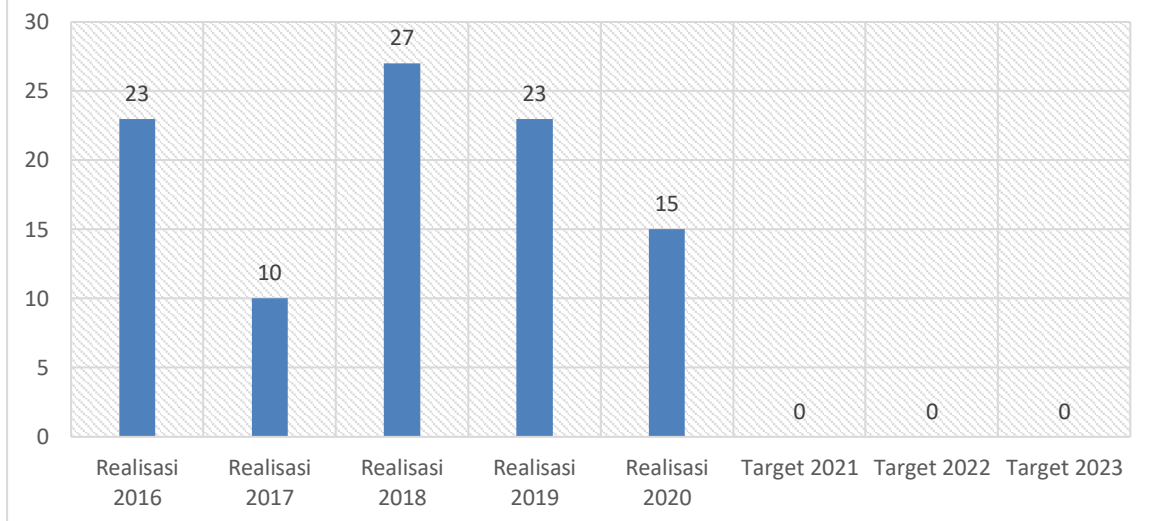
#### **4. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**

Pada Tahun 2014 s/d 2016 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah ditindaklanjuti 100% sesuai target tiap tahunnya diharapkan dapat melayani 100% pengaduan/kasus lingkungan hidup di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti secara cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel dengan melakukan cek lapangan dan memediasi antara masyarakat yang terkena dampak (membuat aduan) dan pencemar (yang diadukan), atau membuatkan rekomendasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

Pada indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada Tahun 2016 s/d 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan setiap Tahunnya menargetkan 100%, artinya diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang masuk. Jika dibandingkan antara awal tahun jangka menengah Tahun 2013 dengan akhir Tahun jangka menengah Tahun 2018, tidak memiliki selisih target. Sedangkan dibandingkan antara realisasi Tahun 2016 dengan target 2018 tidak memiliki selisih. Pada Tahun 2016 target indikator ini dapat tercapai yaitu jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 kasus lingkungan.

Standar nasional untuk indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tidak ada. Indikator ini merupakan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov Sumsel.

Gambar 2.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

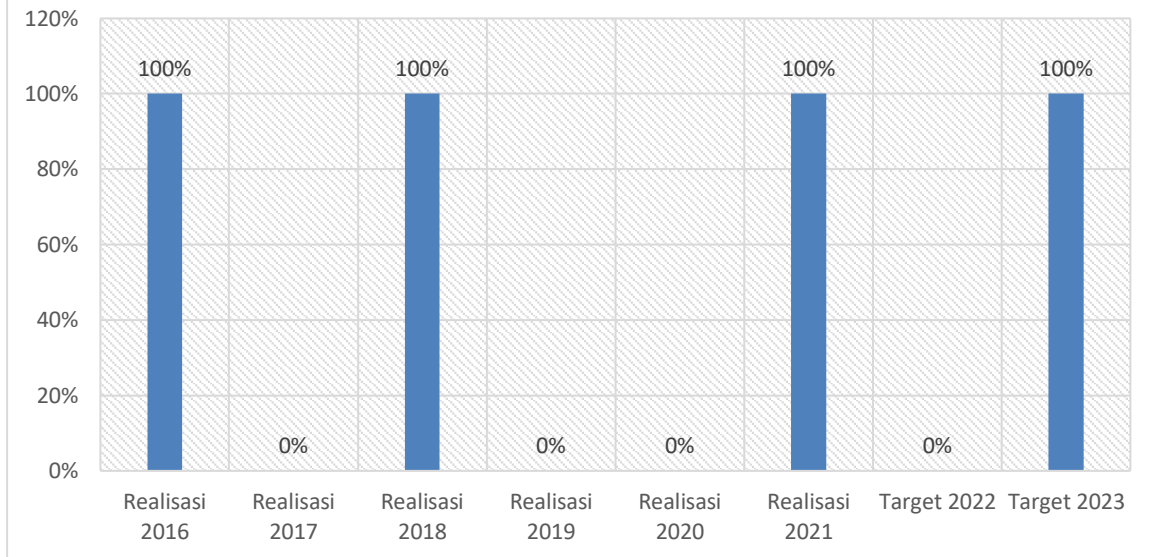


## 5. Jumlah Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan

Pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tidak menerbitkan Perda apapun, begitu juga pada tahun selanjutnya yaitu Tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal ini menunjukkan Indikator kegiatan pada tahun tersebut tercapai 100%.

Perbandingan realisasi di Tahun 2021 dan target akhir jangka menengah di mana target jumlah Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah. Pelaksanaan pencapaian indikator ini hanya ditargetkan selama 1 (satu) Tahun penyusunan yaitu Tahun 2021. Realisasi pelaksanaan telah mencapai target yaitu telah terbitnya Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup.

Gambar 2.6 Jumlah Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang Diterbitkan



## 6. Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi

Pada saat ini laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan satu-satunya laboratorium yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017.

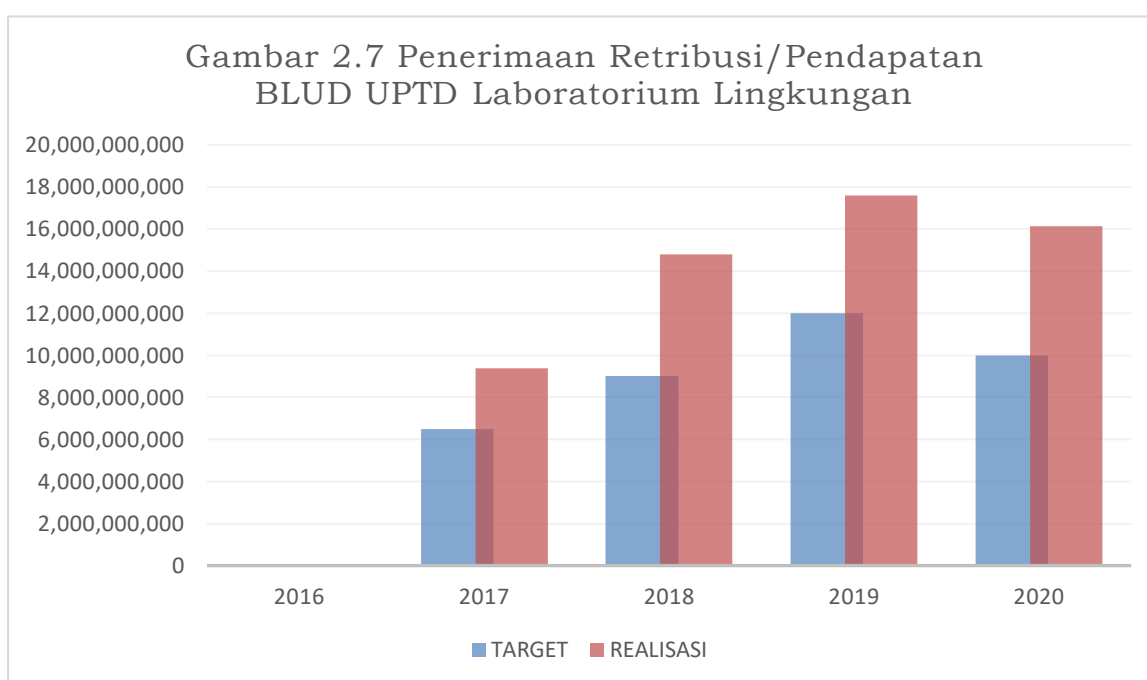
Kemampuan analisa laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan per Tahun 2020 adalah 14.304 sample per bulan dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah Tahun 2014-2015 sebesar Rp.4.346.634.200 s.d Rp.5.833.662.600. Laju kenaikan retribusi analisa limbah Tahun 2016 sebesar 179,50% dari target tahunan yang ditentukan sebesar Rp.3.250.000.000,-. Pada Tahun 2016 melebihi target Retribusi Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan sebesar Rp.2.583.662.600,-. Di Tahun 2017 UPTD Laboratorium Lingkungan mulai menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada system kerja, sehingga system retribusi hanya sampai pada Tahun 2016 dan awal Tahun 2017 saja. Adapun pencapaian pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan pada Tahun 2017 melebihi target yaitu



Rp.9.373.661.306,- atau 144,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.500.000.000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi/Pendapatan  
BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan

Retribusi Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan (Rp. juta)			
2016		2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.250.000.000	5.833.662.600	6.500.000.000	1.203.148.200
% capaian: 179,50%		% capaian: 18,5%	



Pada indikator Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi pada Tahun 2014 s/d 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya menargetkan 100%, artinya Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan udara sehingga adanya pengakuan formal dari lembaga administrasi (sertifikasi KAN) dengan adanya sarana prasarana yang memadai sesuai prosedur laboratorium lingkungan dari KAN.

## 7. Persentase Luas lahan yang di bebaskan oleh Pemprov. Sumsel untuk kepentingan umum

Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pembebasan tanah/tanam tumbuh dan bangunan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 144.012 M<sup>2</sup>. Tidak tercapainya target disebabkan terdapat satu proses ganti rugi tanah tertunda masih dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel.

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pembebasan lahan sebesar 155.205 M<sup>2</sup> (15.52 Ha) dimana target sebesar 205.700 M<sup>2</sup> (20.57 Ha). Tidak tercapai target disebabkan antara lain :

- keterbatasan waktu untuk melaksanakan pembebasan lahan sisa lahan sarpras.
- pengukuran ulang tanah sisa perluasan/perpanjang lintas dayung dan jalan inspeksi.
- Konsinyasi lahan enclave Politeknik Pariwisata Palembang seluas 17.150 m<sup>2</sup>.
- LO dari Kejaksaan terhadap pengadaan untuk pembangunan Depo LRT di Kawasan Jakabaring seluas 5.185 m<sup>2</sup> tidak dapat dibayarkan ganti ruginya.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.11 Realisasi dan Target Luas Lahan yang dibebaskan

SATUAN	REALISASI (M <sup>2</sup> )					TARGET (M <sup>2</sup> )		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LUAS LAHAN	144.012	155205	28239	513	1270	6225	-	12.635

## 8. Persentase Kasus Pertanahan yang di fasilitasi

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Gubernur Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

melakukan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan diluar jalur hukum (non litigasi) dengan persentase kasus pertanahan yang difasilitasi sebagai berikut :

Tabel 2.12 Realisasi dan Target Kasus Pertanahan yang difasilitasi

SATUAN	REALISASI					TARGET		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JUMLAH	63	50	32	38	41	40	40	40
KASUS	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

### 2.4.1. Analisis Renstra K/L

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Analisis Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja Sasaran Provinsi	Capaian Sasaran 2016-2020	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,34 - 68,53	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
2.	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor	3.364.990 tonCO <sub>2</sub> eq - 575200 tonCO <sub>2</sub> eq	

(Pertanian, Kehutanan, dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah		lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
Jumlah Penurunan Laju Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah	250,33 tonCO <sub>2</sub> eq - 9.251,29 tonCO <sub>2</sub> eq	

#### 2.4.2 Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel 2.14 Implikasi RTRW terhadap Pelayanan

No.	Telaah	Permasalahan Pelayanan	Kebutuhan Pelayanan
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen	1.Peningkatan kapasitas SDM penilai AMDAL 2. Peningkatan jumlah serta kapasitas SDM yang memiliki keahlian dalam melakukan pengawasan lingkungan (PPLHD)

		AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota	
--	--	---	--

### 2.4.3 Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.15 Implikasi KLHS terhadap Pelayanan

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan	Kebutuhan Pelayanan
1	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel merupakan tim dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Peningkatan kapasitas SDM agar dapat memahami mengenai konsep dan teknik analisis KLHS terhadap dokumen perencanaan

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (tahun) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini :

## 1. Kekuatan (*strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya;
- d. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati.

## 2. Kelemahan (*weaknesses*)

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/*outcome* dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi;
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Masih terbatasnya SDM baik dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan lingkungan hidup,

hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel;

- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja.

### **3. Tantangan (Threats)**

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai pendukung pembangunan.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
- c. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- d. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- e. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- f. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan kurangnya koordinasi antar sektor.
- g. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- h. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan.
- i. Minimnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan.

- j. Luasnya daerah Provinsi Sumatera Selatan (17 kabupaten/kota) untuk dibina, diawasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan.
- k. Masih terdapatnya pelanggaran oleh perusahaan swasta sebagai investor yaitu pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan izin lokasi dan HGU yang telah diberikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- l. Sulitnya penertiban kepada masyarakat untuk memiliki lahan yang bersertifikat.
- m. Sulitnya proses Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **4. Peluang (Opportunities)**

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pertanahan menjadi fokus kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikut dengan peraturan turunannya, akan mentransformasi posisi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup, dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan organisasi pemerintahan urusan lingkungan hidup yang berbentuk dinas lingkungan hidup tipe A.



## **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Selatan selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan :

Isu Pertama, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.

Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Isu Kedua, Restorasi Gambut. Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar **736.563 hektar**, dan sekitar **43,21 persen** atau 318.268 hektar berada di Kawasan Gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau yang terbakar dengan **luas 978 hektar**, dan kebakaran di Kawasan Gambut seluas 170 hektar atau **17,38 persen**. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar, dan Kawasan Gambut yang terbakar mencapai **805 hektar** atau **8,67 persen**.

Pada Tahun 2017 areal yang terluas mengalami kebakaran yakni di Kawasan APL, yang dari fakta di lapangan banyak terjadi di areal yang terlantar.

Berdasarkan fakta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2017, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dimana Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Prioritas Restorasi Gambut dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

Isu Ketiga, Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan. Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan jumlah timbulan sampah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada data timbulan sampah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63.580 ton/hari, tahun 2016 sebesar 102.021,087 ton/hari, tahun 2017 sebanyak 2.182,35 ton/hari, tahun 2019 sebanyak 1.575 ton/hari. Dan tahun 2020 sebesar 1.574,77 ton/hari. Tahun 2020 Kota Palembang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 931,28 ton/hari dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.668.848 orang dibanding kabupaten/kota lainnya. Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan *system sanitary landfill*, sebagian masih menggunakan *system open dumping* sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh.

Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah

seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Isu keempat, Permasalahan penurunan kualitas perairan. Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend kualitas air mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,25 bila dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,62. Penurunan diakibatkan adanya beberapa titik pantau yang menurun kualitasnya akibat tingginya fecal coli untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Selain dari pada itu, peningkatan konsentrasi TSS akibat meningkatnya produksi batubara sehingga memicu pembukaan lahan untuk tambang batubara terutama di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari IKA Kabupaten Muara Enim yang hanya sebesar 58,77 dan Kabupaten Lahat 61,25. Kalau dibandingkan tahun 2020, IKA Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan 7,75 dan IKA Kabupaten Lahat turun 5,89.

Isu kelima, Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi.

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komooditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesiaau harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastuktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok kepasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor keberbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP *Statistical Review of world energy 2014*). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro. Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 ((tujuh belas) kabupaten/kota.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 adalah

***“Sumsel Maju untuk Semua”.***

Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan yang terdiri atas lima Misi Pembangunan, yaitu:

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Misi 4:</b> Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas	<b>Tujuan 5:</b> Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	<b>Sasaran 12:</b> Maju Kualitas Lingkungan (Meningkatnya kualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Penurunan Emisi GRK

<p>infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman &amp; perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangan pemerataan dan keseimbangan daerah.</p>		<p>lingkungan)</p>	
---	--	--------------------	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2020-2024 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati.

Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019. Maka dari itu telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban Misi ke-4 yakni **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses Kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan,
4. Meningkatkan tata Kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,



- dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; dan,
  4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IndeksSPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas LH dan Pertanahan Prov. Sumsel Berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup</li> <li>• Semakin meningkatn</li> </ul>



	<p>pada kisaran 66,5-68,6.</p>	<p>bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan</li> <li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan</li> <li>• Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</li> </ul>	<p>restauran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai.</li> <li>• Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup</li> <li>• Terjadi perubahan fungsi lahan/hutan untuk pembangunan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan dan</li> </ul>	<p>ya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pemantauan udara tahun 2017 menunjukkan hasil pemantauan peningkatan indeks kualitas udara (96,11).</li> </ul>
--	--------------------------------	--	--	---

			pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan serta aktifitas lainnya.	
2.	Meningkatnya sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia setiap tahun	-	-	-
3.	Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang mendukung derajat keberfungsian ekosistem</li> <li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dalam pengawas dan penegakan hukum lingkungan (PPNS dan PPLHD)</li> <li>• Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Prov. Sumsel sangat tinggi mengingat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang intensif antara provinsi dan kab/kota dalam menangani setiap permasalahan kasus-kasus lingkungan yang timbul.</li> <li>• Telah diterbitkan seperti</li> </ul>

	<p>spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola para pihak, penurunan bahan perusak ozon, dll)</p>	<p>mempertahankan fungsi ekosistem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah timbulan sampah di Prov. Sumsel terjadi peningkatan dari tahun ke tahun</li> </ul>	<p>luasnya lahan gambut yang cukup luas.</p>	<p>Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.12/Menhut</p>
--	--	---	--	--

				-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
--	--	--	--	---

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD**

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023, tidak didapati kegiatan pada OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas LH akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala provinsi yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan OPD Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3.3 Telaah RTRW dan KLHS RPJMD

No.	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Dinas LH dan Pertanahan Provinsi	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Kewenangan Komisi Penilai AMDAL atau dalam pemeriksaan UKL-UPL untuk menolak setiap rencana usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan

		Sumatera Selatan salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota		rencana tata ruang wilayah
2.	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Dinas LH dan Pertanahan merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan (antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan :

#### 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.

Beberapa aturan telah diterbitkan seperti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

#### 2. Restorasi Gambut.

Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar **736.563 hektar**, dan sekitar **43,21**

**persen** atau 318.268 hektar berada di Kawasan Gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau yang terbakar dengan **luas 978 hektar**, dan kebakaran di Kawasan Gambut seluas 170 hektar atau **17,38 persen**. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar, dan Kawasan Gambut yang terbakar mencapai **805 hektar** atau **8,67 persen**.

Pada Tahun 2017 areal yang terluas mengalami kebakaran yakni di Kawasan APL, yang dari fakta di lapangan banyak terjadi di areal yang terlantar.

Berdasarkan fakta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2017, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dimana Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Prioritas Restorasi Gambut dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Sebagai tindaklanjuti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Koordinasi Gambut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 261/Kpts/BanLH/2016 Tanggal 7 April 2016. Dari perjalanan restorasi gambut sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 terdapat kemajuan dan berbagai permasalahan-permasalahan.

### **3. Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan.**

Permasalahan lingkungan yang paling utama diperkotaan adalah masalah pengelolaan sampah. Permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan jumlah timbulan sampah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada data timbulan sampah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 63.580 ton/hari, tahun 2016 sebesar 102.021,087 ton/hari, tahun 2017 sebanyak 2.182,35 ton/hari, tahun 2019 sebanyak 1.575 ton/hari. Dan tahun 2020 sebesar 1.574,77 ton/hari. Tahun 2020 Kota Palembang menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 931,28 ton/hari dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.668.848 orang dibanding kabupaten/kota lainnya. Pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum sepenuhnya menggunakan system *sanitary landfill*, sebagian masih menggunakan



system *open dumping* sehingga berpotensi timbul bau, lalat dan pencemaran air tanah, serta perlu pengadaan TPA baru karena TPA yang lama cepat penuh.

Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

#### **4. Permasalahan penurunan kualitas perairan.**

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend kualitas air mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,25 bila dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,62. Penurunan diakibatkan adanya beberapa titik pantau yang menurun kualitasnya akibat tingginya fecal coli untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Selain dari pada itu, peningkatan konsentrasi TSS akibat meningkatnya produksi batubara sehingga memicu pembukaan lahan untuk tambang batubara terutama di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut terlihat dari IKA Kabupaten Muara Enim yang hanya sebesar 58,77 dan Kabupaten Lahat 61,25. Kalau dibandingkan tahun 2020, IKA Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan 7,75 dan IKA Kabupaten Lahat turun 5,89.

#### **5. Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi.**

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah

untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesialu harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastuktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok kepasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor keberbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP *Statistical Review of world energy 2014*). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro. Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 ((tujuh belas) kabupaten/kota.

Batubara adalah sumber energy terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan cadangan sebesar 24,24 miliar ton atau 48,85

persen dari cadangan nasional yang sebesar 57,84 miliar ton, secara umum batubara di Sumatera Selatan berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 kcal/kg.

## Tujuan Dan Sasaran

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2019-2023 sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan adalah : **"Sumsel Maju Untuk Semua"**

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai misi ke-4 yaitu : **"Maju Kualitas lingkungan Hidup"**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 (T-C.25) sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  
Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
					Target	Target	Target	Target	Target
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	%	11	11,66	12	12,45	13
			Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	50	90
			Persentase pengadaan tanah untuk	%	-	-	80	90	90

			kepentingan umum yang selesai tepat waktu						
			Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	%	-	-	-	90	90
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,35	67,40	70,79	71,17	71,55
			Indeks Kualitas Air	Indeks	62,74	62,82	67,05	67,15	67,25
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,19	96,23	84,55	84,65	84,75
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,189	49,206	38,02	39,86	41,71
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	0	0	68,24	68,82	69,4
			Persentase Penurunan Emisi GRK	%	4,95	5,56	6,18	6,8	0
			Jumlah Penurunan Emisi GRK	ton CO2eq.tahun	4.554.931	4.557.072	4.559.977	4.563.570	4.566.890
			Sektor lahan	ton	4.360.108	4.357.545	4.355.678	4.354.439	4.353.765

			dan gambut	CO2eq.tahun					
			Sektor pertanian dan peternakan	ton CO2eq.tahun	55.013	56.472	57.932	59.391	60.851
			Sektor energi dan transportasi	ton CO2eq.tahun	57.135	59.337	61.653	64.075	66.609
			Sektor limbah	ton CO2eq.tahun	82.675	83.718	84.714	85.665	85.665
			Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	34	34,50	35,60	36	36
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	-	-	12	13	15

## Strategi Dan Arah Kebijakan

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang merupakan rencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan **strategi dan arah kebijakan** yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C. 26) Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi : Sumsel Maju Untuk Semua			
Misi IV : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	5. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan 6. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder (termasuk kab/kota), identifikasi sumber pendanaan (APBN, APBD Prov. Kab/Kota	1. Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengawasan dan pemantauan 2. Melaksanakan inventori dan mengevaluasi emisi GRK sesuai dengan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan. 3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan



		<p>dan sumber lainnya), melakukan sosialisasi pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK, melakukan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan RAD GRK.</p>	<p>teknis bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur bidang LH serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>4. Menyediakan perangkat peraturan perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan;</p>
--	--	--	--

## **Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat tabel T-C. 27 sebagai berikut :

TABEL T-C. 27.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30,026,257</b>	<b>100%</b>	<b>33,198,138</b>	<b>100%</b>	<b>34,522,497</b>	<b>100%</b>	<b>97,746,892</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel</b>	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	100%	150,000	100%	450,000	100%	550,000	100%	1,150,000		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		0	100%	150,000	100%	450,000	100%	550,000	100%	1,150,000		
			Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan laporan SAKIP Dinas	0	0	0	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	150,000		250,000		DLHP
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bid LH	Jumlah laporan capaian pelaksanaan Program/ Kegiatan	0	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	200,000		500,000		17 Kab/Kota
			Rapat Koordinasi Teknis	Terlaksananya rapat koordinasi bidang LH	0	1 Kali	0	1 Kali	200,000	1 Kali	200,000		400,000		DLHP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	100%	9,584,257	100%	10,469,421	100%	10,469,421	100%	30,523,099		
			- Gaji dan Tunjangan ASN		69 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	8,605,317	69 Orang/Bulan	9,361,981	69 Orang/Bulan	9,361,981	69 Orang/Bulan	27,329,279		
			Gaji ASN	Jumlah ASN yang bekerja	69 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	4,944,410	69 Orang/Bulan	4,903,051	69 Orang/Bulan	4,903,051	69 Orang/Bulan	14,750,512		DLHP
			Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah ASN yang bekerja	69 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	3,660,907	69 Orang/Bulan	4,458,930	69 Orang/Bulan	4,458,930	69 Orang/Bulan	12,578,767		DLHP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	859,940	100%	957,440	100%	957,440	100%	2,774,820		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan barang	36 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan	161,760	156 Orang/Bulan	161,760	156 Orang/Bulan	161,760	156 Orang/Bulan	485,280		DLHP
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	110 Orang/Bulan	325 Orang/Bulan	687,180	338 Orang/Bulan	784,680	338 Orang/Bulan	784,680	338 Orang/Bulan	2,256,540		DLHP
			Penyedia Jasa Tutor SKJ	Jumlah senam kantor yang dilaksanakan	39 Kali	44 Kali	11,000	44 Kali	11,000	44 Kali	11,000	44 Kali	33,000		DLHP
			- Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	0	1 Dokumen	119,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	419,000		DLHP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	317,000	100%	637,800	100%	881,600	100%	1,836,400		
			- Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah PSH yang dibuat	0	0	0	94 Stell	197,800	288 Stell	341,600	288 Stell	539,400		DLHP
			- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	1 Dokumen	117,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	417,000		
			Penyusunan Anjab ABK dan Evajab ASN	Jumlah Terpenuhinya Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN DLHP Prov.Sumsel	0	1 Dokumen	117,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	417,000		DLHP
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100%	200,000	100%	290,000	100%	390,000	100%	880,000		
			Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	0	15 Orang	200,000	15 Orang	200,000	30 Orang	300,000	60 Orang	700,000		DLHP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM	0	2 Orang	0	4 Orang	90,000	4 Orang	90,000	10 Orang	180,000		BPSDMD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya		100%	1,502,700	100%	1,968,000	100%	1,808,376	100%	5,279,076		
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor	146 unit	100 Unit	104,000	100 Unit	100,000	100 Unit	100,000	100 Unit	304,000		DLHP
			- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	29 Unit	381,176	37 Unit	408,000	2 Unit	48,376	2 Unit	837,552		DLHP
			- Penyediaan Bahan Logistik kantor		1800 Item	1800 Item	50,000	1800 Item	50,000	1800 Item	50,000	1800 Item	150,000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	1800 Item	1800 Item	50,000	1800 Item	50,000	1800 Item	50,000	1800 Item	150,000		DLHP
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	69500 Lembar	40000 Lembar	37,524	40000 Lembar	60,000	70000 Lembar	60,000	70000 Lembar	157,524		DLHP
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku bacaan kantor	3960 Eksemplar	4380 Eksemplar	30,000	4380 Eksemplar	50,000	4380 Eksemplar	50,000	4380 Eksemplar	130,000		DLHP
			- Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Jumlah perjalanan dinas dalam, luar Provinsi dan luar negeri	210 Orang/Hari	350 Orang/Hari	600,000	350 Orang/Hari	600,000	350 Orang/Hari	800,000	350 Orang/Hari	2,000,000		Indonesia
			- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD				300,000		700,000		700,000		1,700,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website dan Media Sosial yang Dikelola	0	3 (1 Website dan 2 Media Sosial)	300,000	3 (1 Website dan 2 Media Sosial)	600,000	3 (1 Website dan 2 Media Sosial)	600,000	3 (1 Website dan 2 Media Sosial)	1,500,000		DLHP
			E-Office	Jumlah aplikasi yang dibuat		1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	100,000	1 Aplikasi	100,000	1 Aplikasi	200,000		DLHP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik		100%	1,384,070	100%	75,000	100%	650,000	100%	2,109,070		
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	9 Unit	1,384,070	3 Unit	75,000	2 Unit	650,000	11 Unit	2,109,070		
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	0	9 Unit	1,384,070	3 Unit	75,000	2 Unit	650,000	11 Unit	2,109,070		DLHP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani		100%	721,150	100%	1,070,300	100%	1,628,100	100%	3,419,550		
			- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	700 Surat	700 Surat	3,500	700 Surat	3,500	700 Surat	3,500	700 Surat	10,500		DLHP
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang dibayar	84 Kali	72 Kali	280,000	72 Kali	365,000	72 Kali	365,000	72 Kali	1,010,000		DLHP
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tabung Kebakaran yang diisi	5 Tabung	8 Tabung	4,000	8 Tabung	4,000	8 Tabung	4,000	8 Tabung	12,000		DLHP
			- Pengadaan Mebel	Jumlah kursi yang tersedia	0	0	0	0	0	69 Unit	414,000	69 Unit	414,000		DLHP
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	433,650	100%	500,000	100%	500,000	100%	1,433,650		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	1 Gedung	1 Gedung	200,000	1 Gedung	200,000	1 Gedung	200,000	1 Gedung	600,000		DLHP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kantor	72 Kali	150 Kali	200,000	150 Kali	200,000	150 Kali	200,000	150 Kali	600,000		DLHP
			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu DLHP Prov. Sumsel	Jumlah Pengelola Informasi dan Dokumentasi	0	1 Dokumen	33,650	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	100,000	1 Dokumen	233,650		DLHP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik		100%	367,080	100%	1,527,617	100%	535,000	100%	2,429,697		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	12 Unit	11 Unit	167,080	20 Unit	297,617	20 Unit	300,000	20 Unit	764,697		DLHP
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	25 Unit	31 Unit	0	31 Unit	230,000	25 Unit	35,000	87 Unit	265,000		DLHP
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Taman, Lapangan Parkir)	Jumlah gedung yang dipelihara	0	1 Gedung	200,000	1 Gedung	1,000,000	1 Gedung	200,000	1 Gedung	1,400,000		DLHP
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	80%	100%	16,000,000	100%	17,000,000	100%	18,000,000	100%	51,000,000		UPTD Lab.
			- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	0	10 Item	16,000,000	59 Item	17,000,000	11 Item	18,000,000	80 Item	51,000,000		UPTD Lab.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengawasan Internal</b>		100%	350,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	1,350,000		
			Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi			100%	350,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	1,350,000		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi			8 Perusahaan	350,000	10 Perusahaan	500,000	10 Perusahaan	500,000	28 Perusahaan	1,350,000		13 Kab/Kota
			Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi	10 Perusahaan	8 Perusahaan	350,000	10 Perusahaan	500,000	10 Perusahaan	500,000	10 Perusahaan	1,350,000		13 Kab/Kota
			<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>Persentase Konflik lahan yang terselesaikan</b>		100%	250,000	100%	400,000	100%	675,000	100%	1,325,000		
			Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi			1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	400,000	1 Dokumen	675,000	1 Dokumen	1,325,000		
			- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	675,000	1 Dokumen	1,000,000		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Updating data pengadaan tanah	Jumlah dokumen pertanahan	0	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	1,000,000		17 Kab/kota
			Penetapan Lokasi / Pendelegasian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		0	0	0	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	175,000	1 Dokumen	325,000		17 Kab/kota
			<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Jumlah Konflik yang difasilitasi</b>		<b>8</b>	<b>1,200,000</b>	<b>8</b>	<b>1,150,000</b>	<b>8</b>	<b>1,200,000</b>	<b>8</b>	<b>3,550,000</b>		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi			100%	1,200,000	100%	1,150,000	100%	1,200,000	100%	3,550,000		
			- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100%	1,200,000	100%	1,150,000	100%	1,200,000	100%	3,550,000		
			Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses di Sum-Sel	Terlaksananya redistribusi Aset dan Legalisasi Aset Termasuk Penataan Akses	0	40000 Bidang	200,000	40000 Bidang	150,000	40000 Bidang	200,000	40000 Bidang	550,000		12 Kab/Kota
			Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan	32 Kasus	40 Kasus	1,000,000	20 Kasus	1,000,000	50 Kasus	1,000,000	50 Kasus	3,000,000		17 Kab/Kota
			<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk</b>	<b>Luasan Jumlah Lahan yang diganti rugi</b>		<b>6225 M2</b>	<b>13,409,000</b>	<b>12635 M2</b>	<b>16,752,000</b>	<b>27735 M2</b>	<b>14,660,000</b>	<b>27735 M2</b>	<b>44,821,000</b>		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi			100%	13,409,000	100%	16,752,000	100%	14,660,000	100%	44,821,000		
			- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi			100%	13,409,000	100%	16,452,000	100%	14,310,000	100%	44,171,000		
			Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		6225 M2	13,409,000	12635 M2	16,452,000	27735 M2	14,310,000	27735 M2	44,171,000		Banyuasin dan Palembang
			Pembuatan Sertifikat Lahan	Jumlah lahan yang mempunyai sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Banyuasin
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			0	0	100	300,000	100	350,000		650,000		
			<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Nilai IKLH 70.79</b>	<b>900,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.17</b>	<b>1,200,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.55</b>	<b>600,000</b>		<b>3,000,000</b>		
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			0	0	0	0	1 Dokumen	300,000		300,000		
			- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi			0	0	0	0	1 Dokumen	300,000	1 Dokumen	300,000		Prov. Sumsel

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	0	0	0	0	0	1 Dokumen	300,000	1 Dokumen	300,000		Prov. Sumsel
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				900,000		1,200,000	1 Dokumen	300,000		2,700,000		
			- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sumsel	0	0	0	1 Dokumen	300,000	0	0	0	300,000		17 Kab/Kota
			- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKPP yang berpotensi yang menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sumsel	0	1 Dokumen	300,000	0	600,000	0	300,000	0	1,200,000		Banyuasin
			Kajian Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sub DAS	0	2 Sungai	600,000	1 Sungai	300,000	1 Sungai	300,000	4 Sungai	1,200,000		2 Kab/Kota
			<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b> <b>- Persentase Penurunan Emisi GRK</b>		<b>- Nilai IKLH 70.79</b> <b>- 6.18%</b>	<b>15,839,875</b>	<b>- Nilai IKLH 71.17</b> <b>- 6.8%</b>	<b>15,224,875</b>	<b>- Nilai IKLH 71.55</b> <b>- 7.42%</b>	<b>15,579,875</b>	<b>- Nilai IKLH 71.55</b> <b>- 7.42%</b>	<b>46,644,625</b>		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				3,805,000		3,490,000		3,495,000		10,790,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1,865,000		1,480,000		1,565,000		4,910,000		
			Pemantauan Kualitas Air	IKA	0	Nilai IKA 62.89	500,000	Nilai IKA 67.15	270,000	Nilai IKA 67.25	290,000	Nilai IKA 67.25	1,060,000		17 Kab/Kota
			Pemantauan Kualitas Udara	IKU	0	Nilai IKU 96.25	300,000	Nilai IKU 84.65	220,000	Nilai IKU 84.75	220,000	Nilai IKU 84.75	740,000		17 Kab/Kota
			Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan	0	9 Perusahaan	225,000	12 Perusahaan	250,000	50 Perusahaan	275,000	50 Perusahaan	750,000		5 Kab/Kota
			Pemantauan Kualitas Udara Sumber Bergerak	Jumlah kendaraan	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000		10 Kab/Kota
			Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi DAS	Jumlah Dokumen potensi Konservasi DAS yang disusun	0	0	350,000	0	220,000	0	230,000	0	800,000		Prov. Sumsel
			Evaluasi Baku Mutu Air Sungai	Jumlah Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0		Prov. Sumsel
			Evaluasi Baku Mutu Air Limbah	Jumlah dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0		Prov. Sumsel
			Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ,kebun dan lahan	Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	0	240,000	0	270,000	0	300,000	0	810,000		8 Kab/Kota
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1,440,000		1,310,000		1,430,000		4,180,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Updating data emisi GRK melalui Sign Smart	Jumlah Dokumen Emisi GRK	0	1 Dokumen	220,000	1 Dokumen	220,000	1 Dokumen	230,000	1 Dokumen	670,000		6 Kab/Kota
			Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Lokasi Proklim	0	33 Desa	250,000	30 Desa	270,000	37 Desa	270,000	100 Desa	790,000		17 Kab/Kota
			inventarisasi bahan perusak ozon (BPO)	jumlah dokumen BPO	0	1 Dokumen	220,000	0	220,000	1 Dokumen	230,000	1 Dokumen	670,000		Prov. Sumsel
			Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	40 Perusahaan	250,000	0	300,000	50 Perusahaan	300,000	50 Perusahaan	850,000		10 Kab/Kota
			Kampanye Pencegahan Karhutbunlah	Luas Lahan yang Dipantau	0	20000 Ha	200,000	40000 Ha	300,000	60000 Ha	400,000	120000 Ha	900,000		4 Kab/Kota
			evaluasi baku mutu emisi	Jumlah dokumen	0	1 Dokumen	300,000	0	0	0	0	1 Dokumen	300,000		Prov. Sumsel
			Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API)	Jumlah Dokumen RAD API	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Prov. Sumsel
			- Pengelolaam Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			0	500,000	0	700,000	0	500,000	0	1,700,000		
			Pengadaan Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air	Jumlah alat laboratorium tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DLHP
			Penyediaan Alat Pemantau Udara Mobile	Jumlah Alat Pemantau Mobile Online	0	0	500,000	0	0	1 Unit	500,000	1 Unit	1,000,000		DLHP
			Penyediaan Sistem Pemantau Air Kontinyu	Jumlah Alat Pemantau Air Sungai secara Kontinyu	1 Unit	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000		Empat Lawang
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1,150,000		400,000		600,000		2,150,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				1,150,000		400,000		600,000		2,150,000		
			Sistem Informasi LH dan Pertanahan	Jumlah aplikasi yang dibuat sipp link	0	1 Aplikasi	150,000	0	100,000	1 Aplikasi	100,000	1 Aplikasi	350,000		DLHP
			Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat	0	Penetapan Raperda	1,000,000	2 Peraturan	0	1 Peraturan	500,000	4 Peraturan	1,500,000		Prov. Sumsel
			Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang Disusun	0	0	0	1 Dokumen	300,000	0	0	1 Dokumen	300,000		Prov. Sumsel
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				10,884,875		11,334,875		11,484,875		33,704,625		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				2,500,000	0	2,500,000	2 Ha	2,500,000	2 Ha	7,500,000		
			Pelaksanaan pemulihan lingkungan pada lahan akses terbuka	Luas lahan Akses Terbuka yang dipulihkan	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2 Ha	2,500,000	2 Ha	7,500,000		17 Kab/Kota
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				8,384,875		8,834,875		8,984,875		26,204,625		
			Pemdampingan TIM Restorasi Gambut	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	1 Dokumen	1,084,875	1 Dokumen	1,084,875	1 Dokumen	1,134,875	1 Dokumen	3,304,625		10 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Evaluasi Pelaksanaan pemulihan/ restorasi gambut di kawasan berizin	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	0	300,000	0	250,000	60 Usaha Kegiatan	350,000	60 Usaha Kegiatan	900,000		7 Kab/Kota
			Pemulihan Ekosistem Gambut	Luas lahan gambut yang direstorasi	52159 Ha	0	7,000,000	0	7,500,000	7959 Ha	7,500,000	7959 Ha	22,000,000		9 Kab/Kota
			<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan</b>		<b>1 Taman</b>	<b>900,000</b>	<b>1 Taman</b>	<b>900,000</b>	<b>1 Taman</b>	<b>900,000</b>	<b>1 Taman</b>	<b>2,700,000</b>		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				900,000		900,000		900,000		2,700,000		
			- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen yang disusun	0	1 Dokumen	900,000	1 Dokumen	900,000	1 Dokumen	900,000	1 Dokumen	2,700,000		4 Kab/Kota
			<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>	<b>200,000</b>	<b>6%</b>	<b>200,000</b>	<b>6%</b>	<b>400,000</b>		
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi				0		200,000		200,000		400,000		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Penimbunan	Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota	0	0	0	1 Dokumen	200,000	1 Dokumen	200,000	1 Dokumen	400,000		17 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi - Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan		- 12% - 35%	2,495,000	- 13% - 35.6%	1,500,000	- 15% - 36%	1,700,000	- 15% - 36%	5,695,000		
			Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				2,495,000		1,500,000		1,700,000		5,695,000		
			- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH				750,000	0	0	0	0	0	750,000		
			Penyusunan dokumen AMDAL pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3	Jumlah Dokumen yang disusun	0	1 Dokumen	750,000	0	0	0	0	1 Dokumen	750,000		
			- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1,045,000	0	700,000	0	700,000	0	2,445,000		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengawasan Perizinan LH	Jumlah izin lingkungan yang diawasi	0	25 Perusahaan	700,000	25 Perusahaan	300,000	30 Perusahaan	300,000	30 Perusahaan	1,300,000		10 Kab/Kota
			Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri (PROPER)	Jumlah Perusahaan yang dibina	0	30 Perusahaan	45,000	0	0	0	0	0	45,000		17 Kab/Kota
			Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dievaluasi	0	20 Perusahaan	150,000	20 Perusahaan	200,000	20 Perusahaan	200,000	20 Perusahaan	550,000		17 Kab/Kota
			Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	Jumlah Komisi Penilai AMDAL Kab/kota yg dilakukan pembinaan	0	12 Lisensi AMDAL	150,000	12 Lisensi AMDAL	200,000	15 Lisensi AMDAL	200,000	15 Lisensi AMDAL	550,000		17 Kab/Kota
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan				700,000		800,000		1,000,000		2,500,000		
			Penyelesaian Kasus Lingkungan	Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan	5	60 Kasus	700,000	80 Kasus	800,000	100 Kasus	1,000,000	100 Kasus	2,500,000		17 Kab/Kota
			<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi</b>		<b>2 MHA</b>	<b>150,000</b>	<b>2 MHA</b>	<b>100,000</b>	<b>2 MHA</b>	<b>100,000</b>	<b>2 MHA</b>	<b>350,000</b>		
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				150,000		100,000		100,000		350,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				150,000		100,000		100,000		350,000		
			Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi	0	2 MHA	150,000	2 MHA	100,000	2 MHA	100,000	6 MHA	350,000		17 Kab/Kota
			<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Nilai IKLH 70.79</b>	<b>1,000,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.17</b>	<b>1,050,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.55</b>	<b>1,100,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.55</b>	<b>3,150,000</b>		
			Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				1,000,000		1,050,000		1,100,000		3,150,000		
			- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				100,000		100,000		100,000		300,000		
			Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	Jumlah Pramuka yang dibina	0	3 Kegiatan	100,000	3 Kegiatan	100,000	3 Kegiatan	100,000	3 Kegiatan	300,000		Palembang
			- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				900,000		950,000		1,000,000		2,850,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mendukung pengelolaan LH	1000 Orang	1100 Orang	450,000	1100 Orang	450,000	1200 Orang	500,000	3400 Orang	1,400,000		1 Kab/Kota
			Peningkatan Kapasitas SDM Bidang LH	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	0	30 Orang	150,000	30 Orang	200,000	30 Orang	200,000	90 Orang	550,000		Prov. Sumsel
			Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan SDA	Jumlah masyarakat yang dilakukan pembinaan	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000		17 Kab/Kota
			<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Nilai IKLH 70.79</b>	<b>850,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.17</b>	<b>735,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.55</b>	<b>850,000</b>	<b>Nilai IKLH 71.55</b>	<b>2,435,000</b>		
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				850,000		735,000		850,000		2,435,000		
			- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				850,000		735,000		850,000		2,435,000		
			Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Kota Sehat Adipura	8 Kab/kota	10 Kab/Kota	150,000	10 Kab/Kota	200,000	10 Kab/Kota	200,000	10 Kab/Kota	550,000		17 Kab/Kota
			Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	0	33 Sekolah	300,000	35 Sekolah	150,000	35 Sekolah	150,000	35 Sekolah	600,000		17 Kab/Kota
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000	1 Dokumen	285,000	1 Dokumen	400,000	1 Dokumen	885,000		Prov. Sumsel
			Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	Jumlah orang/kelompok	0	5 Orang	200,000	5 Orang	100,000	5 Orang	100,000	5 Orang	400,000		17 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga</b>		24%	620,000	26%	900,000	27%	1,130,000	27%	2,650,000		
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				620,000		900,000		1,130,000		2,650,000		
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan TPA Regional	0	0	0	1 Dokumen	200,000	1 Dokumen	200,000	1 Dokumen	400,000		17 Kab/Kota
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				220,000		300,000		330,000		850,000		
			Monev Persampahan	Persentase data timbulan sampah	0	50%	220,000	70%	300,000	75%	330,000	75%	850,000		17 Kab/Kota
			Dukungan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase data timbulan sampah											
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah TPA/TPST Regional				400,000		400,000		600,000		1,400,000		
			Pengembangan Bank Sampah	Jumlah Motor Sampah	0	10 Motor Sampah	400,000	2 Motor Sampah	400,000	3 Motor Sampah	600,000	15 Motor Sampah	1,400,000		9 Kab/Kota
			- Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			0	0	0	0	0	0		0		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)			
						TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dukungan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase data timbulan sampah		0	0	0	0	0	0		0		
<b>JUMLAH</b>							<b>67,990,132</b>		<b>73,810,013</b>		<b>73,717,372</b>		<b>215,817,517</b>		

TABEL T-C. 27.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2019				TAHUN 2020					
						KINERJA		ANGGARAN (Rp)		KINERJA		ANGGARAN (Rp)			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	1.11	LINGKUNGAN HIDUP											Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani	100%	100%	100%	1,810,904	1,737,518	100%	92.50%	1,651,391	1,555,750		DLHP
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	700 Surat	700 Surat	700 Surat	3,500	2,747	700 Surat	700 Surat	1,750	1,704		DLHP
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 Kali Pembayaran	72 Kali Pembayaran	72 Kali Pembayaran	210,000	208,459	72 Kali Pembayaran	72 Kali Pembayaran	210,000	203,293		DLHP
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tabung Kebakaran yang diisi	5 Tabung	8 Tabung	8 Tabung	4,000	3,988	8 Tabung	8 Tabung	3,930	3,930		DLHP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	12 Unit	13 Unit	13 Unit	141,000	136,760	11 Unit Kendaraan	11 Unit Kendaraan	137,000	129,461		DLHP
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi pengelola keuangan dan barang	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	14,400	14,400	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	30,000	21,000		DLHP
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	200,000	199,756	1 Gedung	1 Gedung	199,579	199,579		DLHP
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1800 item	2715 item	2715 item	50,000	50,000	1800 item	1800 item	35,000	34,903		DLHP
			Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	69500 Lembar	30000 Lembar	30000 Lembar	22,524	22,510	40000 Lembar	40000 Lembar	18,762	18,182		DLHP

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor	146 Buah	107 Buah	107 Buah	4,000	4,000	100 Buah	100 Buah	2,000	2,000	DLHP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar	3960 Eksemplar	3240 Eksemplar	3240 Eksemplar	18,140	16,675	5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	20,000	18,601	DLHP
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat kantor	72 Kali	94 Kali	94 Kali	75,000	74,990	150 Kali	105 Kali	133,000	85,884	DLHP
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	110 Orang/Bulan	227 Orang/Bulan	227 Orang/Bulan	522,880	496,900	247 Orang/Bulan	247 Orang/Bulan	547,170	534,090	DLHP
Penyediaan JasaTutor SKJ	Jumlah Tenaga Instruktur/Tutor Senam	39 Kali	44 Kali	44 Kali	11,000	11,000	44 Kali	11 Kali	13,200	3,250	DLHP
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	210 Orang/Hari	300 Orang/Hari	300 Orang/Hari	534,460	495,334	350 Orang/Hari	350 Orang/Hari	300,000	299,874	Jakarta, Riau, Kepri, Jabar, Jateng, Jatim dan 17 kab/kota
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81.25%</b>	<b>571,835</b>	<b>322,410</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>637,000</b>	<b>636,035</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel</b>
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2 Unit	7 Unit	7 Unit	49,500	45,248	0	0	0	0	DLHP
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	25 Unit	25 Unit	25 Unit	20,000	19,925	31 Unit	31 Unit	40,000	40,000	DLHP
Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi yang tersedia	0	90 Unit	90 Unit	65,000	64,237	0	0	0	0	DLHP
Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	0	0	0	0	0	1 gedung	1 gedung	25,000	24,035	DLHP
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	0	0	0	0	0	1 Unit	1 unit	572,000	572,000	DLHP
Pengadaan Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air	Jumlah alat laboratorium tersedia	0	4 Unit	1 Unit	437,335	193,000	0	0	0	0	DLHP
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>151,900</b>	<b>142,459</b>	<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>108,462</b>	<b>76,441</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel</b>

Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM	0	1 Orang	1 Orang	31,000	30,261	2 Orang	0 Orang	21,415	0	DLHP
Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	0	0	0	0	0	1 Orang	1 Orang	5,423	5,423	DLHP
Benchmarking perencanaan pembangunan perangkat daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	0	3 Orang	3 Orang	30,750	28,772	0	0	0	0	DLHP
Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building	0	3 Orang	3 Orang	40,700	37,514	0	0	0	0	DLHP
Benchmarking peningkatan SAKIPperangkat daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	0	3 Orang	3 Orang	25,750	22,407	4 Orang	4 Orang	81,624	71,018	DLHP
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja Sakip dengan nilai A)	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	0	3 Orang	3 Orang	23,700	23,505	0	0	0	0	DLHP
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkatkan/Berkembang</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>55,600</b>	<b>53,990</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bid LH	Jumlah laporan capaian pelaksanaan Program/Kegiatan	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000	48,390	17 Kab/Kota
Penyusunan LKJIP (DID Kinerja SAKIP)	Persentase LKJIP yang Tersusun	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	5,600	5,600	DLHP
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>140,148</b>	<b>140,148</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel
Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	Jumlah PSH yang dibuat	0	0	0	0	0	144 Steil	144 Steil	140,148	140,148	DLHP
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga</b>	<b>18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>	<b>75,000</b>	<b>73,641</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel



Monev Persampahan	Jumlah data timbulan sampah	0	0	0	0	0	22%	100%	75,000	73,641		17 Kab/Kota
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Nilai Indeks 67.29</b>	<b>Nilai Indeks 67.35</b>	<b>Nilai Indeks 67.35</b>	<b>205,000</b>	<b>190,352</b>	<b>Nilai Indeks 67.40</b>	<b>Nilai Indeks 87.50</b>	<b>617,500</b>	<b>554,350</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel</b>	
Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Kota Sehat Adipura	8 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	65,000	58,458	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	50,000	0		17 Kab/Kota
Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	75,000	67,889	0	0	0	0		17 Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Air	IKA	0	0	0	0	0	Nilai Indeks 62.82	Nilai Indeks 63	100,000	97,010		17 Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Udara	IKU	0	0	0	0	0	Nilai Indeks 96.23	Nilai Indeks 96	130,000	126,454		17 Kab/Kota
Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	0	30 Sekolah	30 Sekolah	65,000	64,004	32 Sekolah	32 Sekolah	50,000	49,567		17 Kab/Kota
Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah izin lingkungan yang diawasi	0	0	0	0	0	20 Perusahaan	20 Perusahaan	150,000	147,791		17 Kab/Kota
Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan	0	0	0	0	0	20 Perusahaan	20 Perusahaan	50,000	47,749		5 Kab/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	Jumlah Komisi Penilai AMDAL Kab/kota yg dilakukan pembinaan	0	0	0	0	0	10 Lisensi AMDAL	10 Lisensi AMDAL	50,000	48,570		17 Kab/Kota
Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian Dokumen Lingkungan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen lingkungan dilakukan evaluasi	0	0	0	0	0	15 Perusahaan	15 Perusahaan	37,500	37,210		17 Kab/Kota
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pengelolaan LH Daerah (KPLHD)</b>	<b>Peringkat 3</b>	<b>21000 Orang</b>	<b>21000 Orang</b>	<b>825,000</b>	<b>754,020</b>	<b>Peringkat 3</b>	<b>Peringkat 3</b>	<b>637,500</b>	<b>627,567</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel</b>	
Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang mendukung pngelolaan LH	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	350,000	327,302	1000 Orang	1000 Orang	300,000	296,609		1 Kab/Kota
Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	0	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000	273,897	0	0	0	0		Prov. Sumsel

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000	92,157	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000	99,865	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	Prov. Sumsel
Sistem Informasi LH dan Pertanahan	Jumlah aplikasi yang dibuat	0	1 Aplikasi Data Spasial	1 Aplikasi Data Spasial	75,000	60,664	2 Aplikasi	2 Aplikasi	150,000	145,324		DLHP
Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	Jumlah orang/kelompok	0	0	0	0	0	4 Orang	4 Orang	37,500	35,915		17 Kab/Kota
Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	Jumlah Pramuka yang dibina	0	0	0	0	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	50,000	49,854		Palembang
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>625,000</b>	<b>362,337</b>	<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>250,000</b>	<b>149,038</b>		
Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi	0	0	0	0	0	6 Perusahaan	6 Perusahaan	75,000	74,250		7 Kab/kota
Updating data pengadaan tanah	Jumlah dokumen pertanahan	0	1 Dokumen	1 Dokumen	125,000	86,462	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000	74,788		17 Kab/kota
Pembuatan Sertifikat Lahan	Jumlah lahan yang mempunyai sertifikat	0	600 Ha	600 Ha	500,000	275,875	0	0	0	0		Banyuasin
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat	0	0	0	0	0	1 Naskah Akademik	1 Naskah Akademik	100,000	0		Prov. Sumsel
<b>Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>94.59%</b>	<b>18,475,323</b>	<b>14,322,463</b>	<b>95%</b>	<b>95.61%</b>	<b>19,755,624</b>	<b>16,387,686</b>		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel
BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah sarana prasarana laboratorium	0	100%	94.59%	18,475,323	14,322,463	10 Item	10 Item	19,755,624	16,387,686		UPTD Lab.
<b>PROGRAM Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim</b>	<b>Persentase Penurunan Emisi GRK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.56%</b>	<b>100%</b>	<b>475,000</b>	<b>465,897</b>		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel
Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	0	0	0	0	120 Perusahaan	120 Perusahaan	200,000	196,734		8 Kab/Kota
Updating data Emisi GRK melalui Sign Smart	Jumlah Dokumen Emisi GRK	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000	46,415		6 Kab/Kota

Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	1.10	Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Lokasi ProKlim	0	0	0	0	0	20 Desa/RW	20 Desa/RW	75,000	73,570	17 Kab/Kota		
			Kampanye Pencegahan Karhutbunlah	Jumlah masyarakat peduli api yang dibina	0	0	0	0	0	90 Desa	90 Desa	50,000	49,700	4 Kab/Kota		
			Pembangunan Taman Kehati	Jumlah Taman Kehati	0	0	0	0	0	1 Taman Kehati	1 Taman Kehati	100,000	99,478	4 Kab/Kota		
			<b>Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>Persentase penurunan emisi GRK</b>	<b>4.33%</b>	<b>4,95%</b>	<b>100%</b>	<b>65,000</b>	<b>60,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel	
			Evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	0	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	65,000	60,604	0	0	0	0	0	0	8 Kab/Kota
			<b>PERTANAHAN</b>													
			<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Persentase Konflik lahan yang terselesaikan</b>	<b>10%</b>	<b>11%</b>	<b>69.77%</b>	<b>6,600,000</b>	<b>2,017,424</b>	<b>11.66% dan 34.5%</b>	<b>100%</b>	<b>5,243,600</b>	<b>2,472,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel
			Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan	32 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	150,000	103,445	40 Kasus	40 Kasus	100,000	85,559			17 Kab/Kota
			Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	28.239 M2	5514 M2	513 M2	6,250,000	1,722,216	1862 M2	931 M2	5,043,600	2,292,257			Banyuasin dan Palembang
			Pengawasan Perizinan LH	Jumlah izin lingkungan yang diawasi	0	40 Perusahaan	40 Perusahaan	200,000	191,762	0	0	0	0	0	0	17 Kab/Kota
Penyelesaian Kasus Lingkungan	Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan	5 Kasus	0	0	0	0	10 Kasus	10 Kasus	100,000	94,679			17 Kab/Kota			
			<b>TOTAL</b>				<b>29,329,962</b>	<b>19,909,586</b>			<b>29,646,825</b>	<b>23,193,040</b>				

## Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel T-C.28 di bawah.

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian setiap tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
<b>4</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>													
4.1	Persentase Konflik Lahan terselesaikan	%	10	11	23,68	11,66	12,19	12	12	12,45	12,45	13	13	13
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	90	90

	peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbtikan													
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	-	-	75	-	75	-	80	-	90	-	90	90
<b>5</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>													
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai IKLH	67.29	67,35	67,59	67,40	68,53	67,43	70,79	67,47	71,17	67,85	71,55	71,55

	Hidup														
5.2	Indeks Kualitas Air	Nilai IKA	62,64	62,74	64,45	62,82	64,62	62,89	67,05	62,93	67,15	64,04	67,25	67,25	
5.3	Indeks Kualitas Udara	Nilai IKU	96.11	96,19	96,30	96,23	96,86	96,25	84,55	96,32	84,65	96,45	84,75	84,75	
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai IKTL	49,17	49,189	49,19	49,206	50,21	49,224	38,02	49,243	39,86	49,263	41,71	41,71	
5.5	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai IKAL	-	-	-	-	-	-	68,24	-	68,82	-	69,4	69,4	
5.6	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	4,33	4,95	4,39	5,56	5,56	6,18	6,18	6,8	6,8	7,42	7,42	7,42	
5.8	Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	33.33	34	34	34,50	34,50	35	35	35,60	35,60	36	36	36	
5.9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap	%	-	-	7,5	-	10	-	12	-	13	-	15	15	

izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# Penutup

### 10.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis 2019-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) mulai tahun 2019 hingga 2023. Rencana Strategis 2019 hingga 2023 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini telah dilaksanakan dengan konsisten, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah bidang lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena didukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2024 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

### 10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis 2019-2023 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Strategis 2019-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) mulai tahun 2019 hingga 2023.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra)
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
5. Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
6. Dalam dinamika perencanaan, sangat memungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari Pusat/Kementerian terkait maupun Kepala Daerah yang menuntut pula perubahan Dokumen ini.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini dan juga kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2019-2023 di Provinsi Sumatera Selatan.